



## Penerapan SAP & Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dengan SPI Sebagai Variabel Moderating

Aswindawaty A. Mahmud<sup>a</sup>, Amir Lukum<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup> Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia.

Email: [aswindamahmud63@gmail.com](mailto:aswindamahmud63@gmail.com)<sup>a</sup>, [amirlukum@ung.ac.id](mailto:amirlukum@ung.ac.id)<sup>b</sup>

### INFO ARTIKEL

#### **Riwayat Artikel:**

Received 07-08-2023

Revised 29-08-2023

Accepted 29-08-2023

#### **Kata Kunci:**

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Pegawai, Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern.

#### **Keywords:**

*Application of Government Accounting Standards, Employee Competence, Quality of Financial Reports, Internal Control Systems.*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara standar akuntansi pemerintahan, kompetensi pegawai, dan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Gorontalo, dengan fokus pada efek moderasi dari sistem pengendalian internal. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan strategi deskriptif kuantitatif, pengumpulan informasi melalui survei. Enam puluh peserta berpartisipasi dalam survei ini sebagai responden. Hasil temuan menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi pegawai, namun sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap hubungan tersebut. Demikian pula, mekanisme pengendalian internal Pemerintah Kota Gorontalo tidak dapat memediasi hubungan antara kecakapan pekerja dan keakuratan pelaporan keuangan.

### ABSTRACT

*The goal of this research was to examine the relationship between government accounting standards, employee competency, and the quality of financial reports in Gorontalo City's municipal government, with a focus on the moderating effect of the internal control system. The researchers in this study used a quantitative descriptive strategy, gathering information through isurveys. Sixty participants participated in this survey as responders. The findings revealed that the quality of financial reports in the local government of Gorontalo City was influenced by the application of government accounting standards and the competence of employees, but that the internal control system had no effect on this relationship. Similarly, the internal control mechanism of Gorontalo City's municipal administration cannot mediate the connection between worker proficiency and the accuracy of financial reporting.*

## PENDAHULUAN

Laporan keuangan adalah dokumen formal yang berisi informasi keuangan tentang suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau pemerintah. Laporan keuangan mencakup berbagai aspek keuangan entitas, termasuk posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, dan perubahan ekuitas selama periode tertentu.

Peran dari laporan keuangan memberikan informasi yang transparan dan terpercaya tentang keuangan entitas. Hal ini memungkinkan para pengguna laporan, seperti pemegang saham, investor, kreditor, dan pemerintah, untuk memahami secara mendalam kondisi keuangan dan kinerja entitas. Selain itu, laporan keuangan memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi pengambil keputusan, seperti investor dan kreditor, untuk mengevaluasi kelayakan investasi atau memberikan kredit kepada entitas. Serta laporan keuangan memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi kinerja keuangan entitas.

Adanya pengaruh secara signifikan terhadap hasil dari LKPD setelah diterapkannya standar akuntansi. Dengan menerapkan standar akuntansi yang relevan dan sesuai, entitas pemerintah daerah dapat memastikan bahwa proses pelaporan keuangan dilakukan dengan konsistensi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Hal ini memungkinkan LKPD untuk menjadi lebih transparan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan dengan entitas sejenis. Dengan menerapkan standar akuntansi dalam pembuatan LKPD tentunya memiliki banyak benefit diantaranya meminimalisir kesalahan yang terdapat dalam LPKD, meningkatnya kualitas informasi yang dihasilkan sehingga tingkat kepercayaan penggunanya akan meningkat dan menghasilkan opini publik yang bagus.

Kualitas laporan keuangan selain ditentukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), faktor penunjang lainnya adalah kompetensi pegawai. Kemampuan seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan keahlian dan kapasitas kerjanya sehingga menghasilkan suatu hasil kerja yang maksimal merupakan pengertian dari Kompetensi Pegawai. Dalam semua sektor termasuk sektor keuangan pemerintah dibutuhkan pegawai yang *expert* dan handal dalam menjalankan pekerjaannya begitupun dalam pembuatan LKPD sehingga hasil yang didapatkan akan maksimal. Jika kompetensi pegawai buruk atau tidak memadai maka hasil kerja yang akan diperoleh juga akan butuk dan tidak maksimal, sehingga akan menimbulkan banyak permasalahan baru. Begitupun dalam pembuatan LKPD jika kompetensi pegawai tidak memadai maka laporan yang dihasilkan juga tidak maksimal.

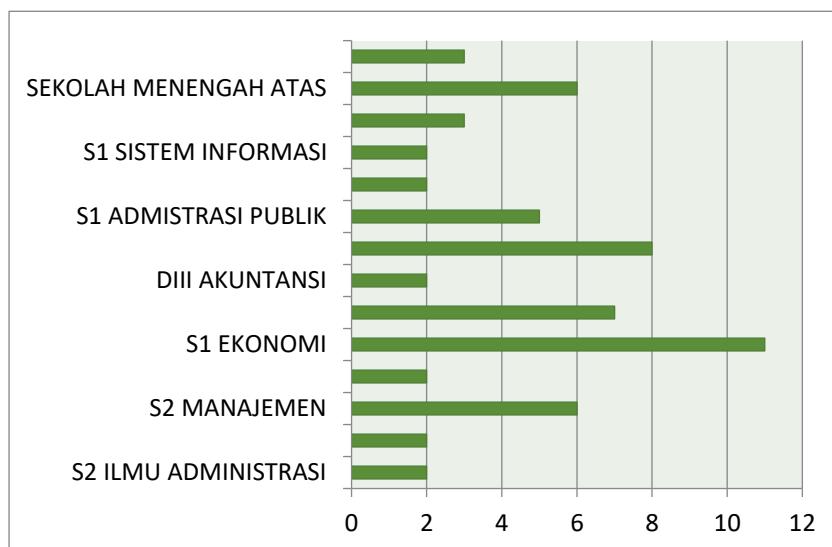
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual telah diterapkan dalam penyelenggaraan Badan Keuangan Kota Gorontalo. Berdasarkan wawancara langsung dengan Kepala Sub Bidang Akuntansi, bahwa Pemerintah Kota Gorontalo wajib mengimplementasikan SAP No. 71 Tahun 2010 guna memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan. Dengan demikian tujuan dari laporan keuangan dapat terealisasikan dan akan membantu pemakainya untuk menentukan keputusan. Untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang maksimal maka diterapkan syarat penyusunan sesuai dengan SAP yang berlaku.

Tercatat selama lima tahun berturut-turut (2017-2021) LKPD Kota Gorontalo mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Menurut hasil wawancara). Namun, jika diperhatikan kembali masih ditemukan lebih dari satu kasus dalam penyajian laporan keuangan tersebut, terutama pada Laporan Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2021, seperti: Penyajian piutang jasa pelayanan RS. Aloe Saboe dicatat nominalnya kurang dan setelah di audit ternyata masih ada penambahan jumlah piutang. (Laporan Neraca Tahun Anggaran 2021), dan terdapat kesalahan penganggaran yakni penyajian belanja barang dan jasa yang seharusnya masuk di belanja pemeliharaan tetapi outputnya di aset tetap. (Laporan Realiasi Anggaran Tahun 2021).

Catatan mengenai rendahnya kualitas laporan keuangan dan kurangnya kompetensi pegawai di Badan Keuangan Kota Gorontalo. Penerapan sistem akutansi berbasis akrual pada tahun 2014 berpotensi menjadi faktor rendahnya kualitas laporan keuangan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan agar hasil dari laporan keuangan maksimal adalah dengan memberikan pelatihan terhadap para pegawai sehingga mereka dapat memaksimalkan kinerjanya juga. Tingkat pendidikan terakhir para pegawai di Badan Keuangan Kota Gorontalo juga dapat menjadi indikator dalam melihat situasi ini.

Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan tingkat pendidikan terakhir dari para pegawai tersebut.

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Keuangan Kota Gorontalo



Sumber: Badan Keuangan Kota Gorontalo, 2023

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah negara, perlu kuatnya sistem pengendalian intern, hal ini juga dimaksudkan agar tujuan sebuah instansi dapat terealisasikan dan hasil dari sebuah laporan keuangan akan maksimal. Salah satu bentuk upaya agar sebuah laporan keuangan memiliki kualitas yang bagus adalah dengan memiliki SIP yang efektif.

Sistem pengendalian intern Dewan Keuangan Daerah Gorontalo memanfaatkan secara maksimal ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Mendapatkan kepercayaan orang sangat penting untuk melakukan hal-hal seperti mengikuti undang-undang, mengelola pemerintahan negara bagian secara efisien, dan mengeluarkan laporan keuangan yang akurat. Konstruksi sistem tersebut, secara teori, harus mengarah pada perbaikan LKPD.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### **Teori *Stewardship***

Penelitian ini didasarkan pada teori *stewardship*. Teori *Stewardship* (Donaldson & Davis, 1991), menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas principals dan manajemen. Teori ini mengasumsikan dimana terdapat hubungan antara organisasi pemerintah dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mensejahterahkan masyarakat. Organisasi pemerintahan merupakan suatu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang telah dijalankan selama periode yang telah ditentukan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengefektifkan pekerjaan dalam organisasi yang akan menghasilkan sebuah laporan informasi keuangan yang baik dan berkualitas.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas (*accountability*) secara bahasa dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban (Ihyaul, 2004). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian terpenting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah, dimana hasil pertanggungjawaban laporan keuangan memiliki pengaruh yang besar dalam menilai baik buruknya kinerja pemerintah. Semakin akuntabel tingkat pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik pula tingkat pencapaian kinerja pemerintah (Purnama & Nadirsyah, 2016).

### **Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah dokumen yang merangkum statistik keuangan perusahaan atau organisasi komersial lainnya untuk periode waktu tertentu, seringkali setahun. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca adalah tiga jenis laporan keuangan yang paling mendasar. Jenis laporan keuangan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu.

1. Relevansi: Data dalam laporan keuangan harus relevan dengan proses pengambilan keputusan pengguna.
2. Keandalan: Data dalam laporan keuangan harus akurat dan dapat diakses untuk diverifikasi secara independen.
3. Kepatuhan: Informasi laporan keuangan harus mematuhi peraturan akuntansi yang relevan dan kerangka kerja konseptual.
4. Akurasi: Informasi dalam laporan keuangan harus mendekati akurat.
5. Keterbacaan: Laporan keuangan harus ditulis sedemikian rupa sehingga orang dengan pemahaman dasar akuntansi dapat dengan mudah memahaminya.

### **Kompetensi Pegawai**

Setiap sektor publik memiliki tujuan yang ingin terealisasikan, dalam prosesnya salah satunya dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memiliki potensi yang memadai dalam proses tersebut. Kompetensi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan *knowledge, skill, & attitude* yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam suatu bidang atau pekerjaan. Tiga komponen utama dalam pembentukan kompetensi (Hutapea & Thoha, 2008 : 28) adalah:

1. *Knowledge*: Pengetahuan mencakup pemahaman dan informasi yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Ini melibatkan pemahaman tentang konsep, teori, prinsip, dan fakta yang relevan dalam suatu bidang atau pekerjaan tertentu. Pengetahuan yang baik membantu individu dalam memahami dasar-dasar dan mengembangkan landasan yang kuat untuk membangun kompetensi.
2. *Skills*: Keterampilan adalah kemampuan praktis yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, dan pengaplikasian pengetahuan dalam situasi nyata. Keterampilan yang baik memungkinkan individu untuk menerapkan pengetahuan mereka dengan sukses dan berkontribusi secara efektif dalam lingkungan kerja.
3. *Sikap (Attitude)*: Sikap mencakup aspek psikologis dan perilaku individu yang mempengaruhi bagaimana mereka mendekati pekerjaan dan situasi yang dihadapi.

### **Sistem Pengendalian Intern**

Sistem pengendalian intern (SPI) yang ada pada perusahaan akan menentukan keberhasilan perusahaan tersebut. SPI adalah serangkaian prosedur, kebijakan, dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa operasi organisasi berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dari SIP untuk melindungi aset organisasi, memastikan akurasi dan integritas informasi keuangan, mempromosikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, serta meningkatkan

efisiensi operasional. Melalui sistem pengendalian intern yang efektif, organisasi dapat mengurangi risiko, meningkatkan kinerja, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

PP No. 60 Tahun 2008 mencakup beberapa elemen yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern, yang merujuk pada praktik-praktik yang telah diterapkan dalam konteks pemerintahan di berbagai negara. Elemen-elemen tersebut meliputi: 1) Lingkungan Pengendalian, yang mencakup budaya dan nilai-nilai organisasi yang mendukung pengendalian yang efektif; 2) Penilaian Risiko, yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan penanganan risiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi; 3) Kegiatan Pengendalian, yang mencakup implementasi kebijakan, prosedur, dan praktik pengendalian yang bertujuan untuk meminimalkan risiko dan mencapai tujuan organisasi; 4) Informasi dan Komunikasi, menyajikan informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan; 5) Pemantauan, yang melibatkan pengawasan terhadap efektivitas dan keandalan sistem pengendalian serta identifikasi kelemahan dan perbaikan yang diperlukan.

### **Hipotesis Penelitian**

Beberapa asumsi mengenai kualitas laporan keuangan pada Lembaga Keuangan Kota Gorontalo dikemukakan dalam penelitian ini. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu.

- H1 : Penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- H2 : Kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- H3 : Penerapan SAP dan kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- H4 : Sistem Pengendalian Intern memoderasi pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan.
- H5 : Sistem Pengendalian Intern memoderasi pengaruh kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan.

### **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggabungkan strategi kuantitatif dengan teknik deskriptif untuk lebih mengkarakterisasi jenis penelitian yang dilakukan. Beberapa aspek yang berbeda menjadi fokus analisis studi ini Penerapan SAP dan kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan. Hubungan antara variabel independen dan dependen dimoderasi oleh SPI. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut di atas.

### **Populasi dan Sampel**

Sebanyak 125 pegawai dari Badan Keuangan Kota Gorontalo berpartisipasi dalam penelitian ini. Pegawai Badan Keuangan Kota Gorontalo yang berstatus ASN menjadi sampel penelitian, terutama yang bekerja di bagian keuangan. Sampel juga termasuk Kabid, Bendahara, dan individu dari profesi yang terkait. *Purposive*

*sampling* digunakan untuk memilih sampel, menggunakan kriteria yang ditentukan oleh tujuan penelitian.

### Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk mengkarakterisasi data, uji validitas dan reliabilitas dijalankan untuk memastikan instrumen penelitian valid dan reliabel, uji normalitas data dilakukan untuk menentukan apakah data terdistribusi normal, dan korelasi berganda diperiksa. model regresi linier dan analisis regresi dengan variabel moderasi digunakan untuk menguji hipotesis. Selain itu, SPSS Versi 25 digunakan sebagai alat pengolah data dalam penelitian ini untuk membantu pengolahan dan analisis data secara statistik. Peneliti dapat menggunakan alat ini untuk memeriksa koefisien determinasi, yang menawarkan ringkasan seberapa baik faktor-faktor yang diselidiki dapat menjelaskan perubahan kaliber laporan keuangan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regresi Berganda

Tabel berikut menunjukkan hasil studi regresi linier berganda yang dilakukan di SPSS:

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients	B	Standardized Coefficients	Beta	
1 (Constant)	5.592	2.571		2.175	.034
Penerapan SAP	.257	.078	.391	3.282	.002
Kompetensi Pegawai	.616	.164	.447	3.758	.000

Sumber : Data diolah SPSS versi 25 (2023)

Model Persamaan regresi linier berganda adalah:

$$Y = 5.592 + 0,257X_1 + 0,616X_2 + e$$

1. Bila menggunakan standar akuntansi pemerintahan dan keahlian pegawai tetap, angka tetap 5,592 merupakan nilai rata-rata kualitas laporan.
2. Penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,257 yang menunjukkan pengaruh yang positif. Jika penerapan SAP meningkat 1%, maka akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sebesar 25,7%.
3. Koefisien regresi untuk variabel kompetensi pegawai memiliki nilai 0,616 yang menandakan pengaruh positif dari variabel tersebut. Peningkatan 1% pada kompetensi pegawai berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan sebesar 61,6%.

Tabel 2. Hasil Uji Simultan

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	869.383	2	434.692	42.929	.000 <sup>b</sup>
Residual	577.177	57	10.126		
Total	1446.560	59			

Sumber : Data diolah SPSS versi 25 (2023)

Berdasarkan tabel 2. diketahui bahwa hasil perhitungan uji F sebesar 35.884 dengan signifikansi 0,000 dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan Kompetensi Pegawai (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) di Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.

### Analisis Regresi dengan Variabel Moderasi (MRA)

MRA menggunakan uji statistik untuk menentukan apakah variabel moderasi secara signifikan mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil analisis regresi dengan variabel moderasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Regresi Variabel Moderasi Penerapan SAP \* Sistem Pengendalian Intern

Model	Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.148	1.500	16.005	.000
	Penerapan SAP	.257	.078	.391	.002
	PenerapanSAP*SistemPengendalianIntern	.002	.002	.203	.384

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data diolah SPSS versi 25 (2023)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui persamaan regresi dengan variabel moderasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 18.148 + 0,257_1 + 0,002_2 + e$$

Penjelasan dari persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 18.148 yang berarti bahwa variabel independen ( $X_1 \cdot Z$ ,  $X_2 \cdot Z = 0$ ) maka nilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 18.148
- 2) Nilai koefisien regresi untuk variabel moderasi ( $X_1 \cdot Z$ ) memiliki nilai sebesar 0,002 yang artinya setiap kenaikan variabel system pengendalian intern memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintah yang akan diikuti oleh penurunan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,002.

Tabel 4. Hasil Regresi Variabel Kompetensi Pegawai \* Sistem Pengendalian Intern

Model	Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.434	2.961	5.889	.000
	Kompetensi Pegawai	.616	.164	.447	.000
	Kompetensi Pegawai*SistemPengendalianIntern	.013	.005	.598	.012

Sumber : Data diolah SPSS versi 25 (2023)

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui persamaan regresi dengan variabel moderasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 17.434 + 0,616_1 + 0,013_2 + e$$

Penjelasan dari persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 17.434 yang berarti bahwa variabel independen ( $X_1 \cdot Z$ ,  $X_2 \cdot Z = 0$ ) maka nilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 17.434
- 2) Nilai koefisien regresi untuk variabel moderasi ( $X_2 \cdot Z$ ) memiliki nilai sebesar 0,013 yang artinya setiap kenaikan variabel sistem pengendalian intern memoderasi kompetensi pegawai yang akan diikuti oleh peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,013.

## Pembahasan

### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Dalam hasil penelitian ini, diperoleh penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo. Akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi di mana transaksi dan peristiwa ekonomi dicatat pada saat terjadi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan mewajibkan pengakuan dan pencatatan transaksi pada saat terjadi, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar. Sebuah penelitian di Pemerintah Kabupaten menunjukkan bahwa penerapan SAP berdampak positif pada kualitas laporan keuangan. Penelitian lain juga menghasilkan temuan serupa, bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori kepengurusan yang menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dapat menjalankan perannya sebagai lembaga atau wahana yang dapat dipercaya untuk menampung pengaduan masyarakat, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan mempertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan. Steward (manajer dan auditor internal) sangat perlu mengelola seluruh kemampuannya dalam mengefektifkan pengendalian internal sehingga dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas tinggi guna memenuhi tanggung jawab tersebut (Meis dan Eriños, 2020). Oleh karena itu, teori penatagunaan bertanggung jawab dalam penyelidikan ini untuk memberikan informasi yang berguna kepada pengguna data keuangan pemerintah. Anda akan dapat memperoleh laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan keinginan prinsipal karena adanya standar akuntansi pemerintahan.

### **Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil penelitian diperoleh kompetensi pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Keberadaan pegawai yang

berpengalaman dan memiliki pengetahuan akuntansi memudahkan pengolahan data keuangan sehingga laporan keuangannya berkualitas baik dan mudah dipahami.

Penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menyatakan bahwa buruknya kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah disebabkan oleh kurangnya SDM yang mengendalikan sistem akuntansi berbasis akrual. Dengan laporan keuangan yang disajikan secara cepat dan tepat, akan memudahkan para pihak kepentingan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini terkait dengan teori stewardship yang berpandangan bahwa faktor intrinsik, reward berupa prestasi, keanggotaan, dan aktualisasi diri, serta motivasi untuk bekerja keras dalam organisasi memperkuat hubungan stewardship. Menurut Wandini dan Budiasih (2017), pegawai yang bekerja di subsektor keuangan perlu dipersiapkan, memiliki sumber daya manusia yang kompeten, memiliki pengalaman bekerja di bidang keuangan, dan mengikuti banyak pendidikan dan pelatihan.

### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Penelitian ini menemukan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi pegawai memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Kualitas laporan keuangan yang baik sangat penting untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan yang tepat. Temuan ini sejalan dengan teori akuntabilitas yang menuntut pihak sektor publik untuk memberikan pertanggungjawaban dan melaporkan aktivitas dan kinerja mereka melalui laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan bagian dari reformasi sektor publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan memenuhi hak-hak publik untuk informasi yang tepat dan terbuka. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat dengan memenuhi aspek akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan masyarakat.

### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Intern**

Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh sistem pengendalian internal tidak memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Badan Keuangan Kota Gorontalo masih memiliki beberapa masalah dalam penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sehingga sistem pengendalian intern masih memastikan kepatuhan terhadap peraturan dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berlaku. Hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang disusun. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan. Meskipun penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah dapat mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan, hal ini tidak terjadi pada

Pemerintah Kota Gorontalo karena peran Badan Keuangan Kota Gorontalo yang hanya sebatas pengawasan melalui kegiatan PKPT.

Penelitian ini mendukung teori stewardship, di mana pelayan yang bertindak secara kolektif bekerja sama dengan utilitas yang tinggi dan selalu siap untuk melayani. Dalam konteks ini, pemerintah dan auditor internal bekerja sama dan kooperatif dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas mereka dalam mengimplementasikan pengendalian internal yang efektif dengan menggunakan teknologi yang tersedia dan menerapkan SAP yang berlaku untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

### **Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Intern**

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dapat memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga sejalan dengan teori stewardship yang mengemukakan bahwa pemerintah sebagai steward harus meningkatkan kompetensi pegawai agar dapat memberikan yang terbaik pada masyarakat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan sistem pengendalian internal yang memadai dan mampu memfasilitasi serta memberdayakan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian sebelumnya oleh Kapriana dan Agung (2020) serta Angelita dan Saiful (2019) yang juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil riset, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pengaruh yang besar dan positif terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Ketika undang-undang akuntansi pemerintah ditegakkan dengan lebih baik, laporan keuangan lebih andal. (2) Pemerintah Daerah Kota Gorontalo mengandalkan keahlian para pekerjanya untuk memastikan keakuratan laporan keuangannya. Ketika pekerja memperoleh lebih banyak keterampilan, laporan keuangan juga meningkat kualitasnya. (3) Pemerintah Daerah Kota Gorontalo mengandalkan baik Standar Akuntansi Pemerintahan maupun keahlian pegawainya untuk membuat laporan keuangan yang handal. Menerapkan peraturan akuntansi pemerintah dengan benar dan memiliki pekerja terampil berkontribusi pada pelaporan keuangan berkualitas lebih tinggi. (4) Sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Gorontalo tidak mungkin mempengaruhi korelasi antara kompetensi pegawainya dengan keandalan laporan keuangannya. (5) Sistem pengendalian internal Gorontalo memediasi korelasi antara keterampilan pekerja dan keakuratan pelaporan keuangan kota. Pengendalian internal dapat berfungsi dengan efisiensi tertinggi.

Berdasarkan hasil dari riset yang dilakukan, peneliti menyimpulkan beberapa saran yang dapat diberikan sebagai masukan dan sebagai berikut: (1) Kota Gorontalo

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk Badan Keuangan dengan sangat baik. Namun, tanggapan terhadap kuesioner menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Kota Gorontalo perlu meningkatkan penyajian laporan keuangan, pencatatan atau penilaian aset tetap berdasarkan harga perolehan, dan klasifikasi aset tetap berdasarkan fungsinya dalam entitas operasi. Penerimaan didokumentasikan secara bruto dalam Laporan Realisasi Anggaran, baik cash basis maupun accrual basis (LRA). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sangat memuaskan. (2) Kompetensi pegawai Badan Keuangan Kota Gorontalo dinilai sangat baik, namun menurut rangkuman tanggapan responden terhadap kuesioner, BKD perlu menambah pengetahuan guna meningkatkan kompetensi pegawai khususnya di bidang akuntansi atau keuangan. bidang khususnya, dengan meningkatkan keahlian akuntansi karyawan. (3) Lembaga Keuangan Kota Gorontalo perlu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menyusun laporan keuangan secara cermat dalam arti informasi yang disajikan digunakan sesuai dengan kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus serta dengan optimalisasi. Kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Gorontalo sangat tinggi. (4) Meskipun Sistem Pengendalian Intern Badan Keuangan Kota Gorontalo dinilai sangat baik, namun responden kuesioner menyatakan bahwa BKD Gorontalo harus meningkatkan risk assessment untuk mencegah terjadinya pelanggaran sistem akuntansi. Di Badan Keuangan Kota Gorontalo, kepala subbidang juga harus memperbaiki pengelolaan sistem dan prosedur akuntansi yang ada. (5) Disarankan peneliti tambahan yang berminat dan akan melakukan penelitian dengan judul yang sama atau penelitian yang sama menguji variabel lain yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti komitmen organisasi, pengelolaan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan. menggunakan variabel lain yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian selanjutnya juga harus dapat membandingkan temuan penelitian sebelumnya dengan melihat berbagai situs atau unit analisis dan meningkatkan jumlah sampel dan populasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, P. P., Suratno, & Supriyadi, E. (2019). Analisis Determinan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekobisman*, 3(3), 212–225.
- Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. *Valuta*, 6(1), 41–54. <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1145%0Ahttp://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/download/1145/690>
- Dariana, & Jonase Oktavia, S. A. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 77–105.
- Dewi, N. F., Ferdous Azam, S. M., & Yusoff, S. K. M. (2019). Factors Influencing The Information Quality Of Local Government Financial Statement And

- Financial Accountability. *Management Science Letters*, 9(9), 1373–1384. <Https://Doi.Org/10.5267/J.Msl.2019.5.013>
- Diansyah, A. S., Yantiana, N., & Hamsy, N. F. (2019). Pengaruh Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara, Sistem Informasi, Dan Reviu Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Moderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Pontiana). *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 104–116.
- Fidayanti, E. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kota Bandung). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) Ekuitas*.
- Fikri, M. A., Inapty, B. A., & Martiningsih, R. S. P. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating. *M. Ali Fikri Biana Adha Inapty Rr. Sri Pancawati Martiningsih*, 53(9), 1689–1699.
- Gunarto, Muji. (2017). Tranformasi Data Ordinal Ke Interval Dengan Method Of Successive Interval (MSI). [http://eprints.binadarma.ac.id/3889/2/Teori\\_MSI.pdf](http://eprints.binadarma.ac.id/3889/2/Teori_MSI.pdf)
- Ghozali, I. (2016). *Applikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23 (VIII)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Applikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, Rustam. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *AKSES : Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 8 No. 16, Oktober, 2013.
- Hardyansyah. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Polewali Mandar) [*Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*].
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Hendri, M., & NR, E. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2479–2493.
- Herlina, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *Journal Of Economic, Business And Accounting*, 4(2), 419–433.

- Inapty, M. A. F. B. A., & Martiningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Ilmu Akuntansi*, 9(April), 27–42. <Https://Doi.Org/10.15408/Akt.V9i1.3583>
- Indriani, M., Mulyany, R., & Munandar, W. (2018). Readiness of Local Government in the Implementation of Accrual Accounting: The Case of Local Government in Aceh, Indonesia. *Dinamika Akuntansi Dan Bisnis (JDAB)*, 5(1), 87–100. <Https://doi.org/Https://dx.doi.org/10.24815/jdab.v5i1. 8441>
- Ikyarti, T., & Nila, A. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140.
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Junaidi. (2015). Panduan Program Ordi (Transformasi data Ordinal ke Interval). [Https://repository.unja.ac.id/133/1/panduan\\_ordi\\_junaidi2015.pdf](Https://repository.unja.ac.id/133/1/panduan_ordi_junaidi2015.pdf)
- Kapriana, A. P., & Agung, I. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Opd Dikabupaten Kuburaya). *Jurnal Audit Dan Akuntansi*, 9(1), 47–70.
- Kholmi, M. (2010). Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi. *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, 2(2), 357–369.
- Langwo, A. S., & Syahdan, S. A. (2022). Determinan Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kota Banjarmasin dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Prosiding National Seminar on Accounting UKMC*, 1(1), 286–302.
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Akuntansi*, 5, 1.
- Muhidin, S.A & Abdurahman, M. (2017). *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Nurhasanah, Firmasnyah, & Sari, K. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *Akuntanika*, 4(1), 1–18.

- Nugroho, B. S. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Pebriani, R. A. (2029). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Banyuasin Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(1), 55–62.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal
- Renyowijoyo, M. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta; Mitra Wacana Media.
- Rahayu, L., Kennedy, & Anisma, Y. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). *JOM Fekon*, 1(2), 1–15.
- Setiyawati, H., Iskandar, D., & Buana, U. M. (2020). Importance of Internal Accountants' Competence in Shaping Good Quality Financial Reporting in Local Governments in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change.*, 11(1), 20–37.
- Suwanda, D. (2015). Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). *Journal of Finance and Accounting*, 6(4), 139–158.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- T. Asri Yunita. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpd Kota Dumai). *Jom Fekon*, 2(2), 1–15.